

Pendidikan Aparatur Sipil Negara di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Implementasi *Vocational and Technical Education*

Adriwati

STIA LAN Jakarta

aadriawati@gmail.com

Abstract

To be able to compete in welcoming the ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia needs to improve the management of its human resources. The first challenge faced is the increasing unemployment, the second is the challenge of professions that are open to placement by foreign workers, the third is related to the competitiveness level of Indonesian workers. So it is very important for Indonesian workers, especially civil servant (ASN), to have skills that can be applied directly and appropriately in the work environment. On the other hand, vocational education is higher education that supports the mastery of certain applied skills, where it is hoped that vocational graduates have possessed skills that can be directly applied in the working world. Therefore, this research aims to examine how the implementation of Vocational and Technical Education in the era of the ASEAN Community. The study was conducted using descriptive-qualitative research methods. Data collection techniques are done by interview and documentation review. The tertiary institutions observed were STAN's State Polytechnic (PKN) and Jakarta School of Shipping (STIP). While the data analysis technique used is the processing of raw data from interviews and other written materials. Based on the analysis result, implementation of Vocational and Technical Education in PKN STAN and STIP Jakarta, applies the principles of vocational education, including: training tasks are carried out in the same manner, tools and machinery as determined at the workplace. Learning methods are provided in order to enable each individuals to capitalize their knowledge and skills according to the needs of the profession. Furthermore students are given appropriate training experience as required in the job, and in each position there is a minimum ability of a person so that he can still work in his position. In addition, vocational education has paid attention to its market specialization. As a recommendation, it is recommended that other vocational education providers under the ministry other than Kemenristekdikti also implement a vocational education program, in order to answer the challenges of the ASEAN Community era.

Keywords: ASEAN economic community; civil servant; vocational education

Abstrak

Untuk dapat turut bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya manusianya. Tantangan pertama yang dihadapi yaitu peningkatan jumlah pengangguran, kedua yaitu profesi-profesi yang mungkin terbuka untuk masuknya tenaga kerja asing dalam persaingan kerja di dalam negeri, yang ketiga yaitu terkait tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia. Sehingga sangat penting bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya ASN, untuk memiliki keterampilan yang dapat diterapkan secara tepat guna di lingkungan kerja. Di lain pihak, Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, dimana diharapkan lulusan vokasi telah memiliki bekal keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Implementasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Teknik di era Masyarakat ASEAN. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen. Perguruan tinggi yang diamati adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN serta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah pengolahan data mentah hasil wawancara dan bahan-bahan tertulis lain. Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Teknik oleh PKN STAN dan STIP Jakarta, menerapkan prinsip-prinsip pendidikan vokasi, diantaranya: tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Metode pembelajaran diberikan agar dapat memampukan setiap

individu memodali pengetahuan dan ketrampilannya sesuai kebutuhan profesi. Lebih lanjut peserta didik diberikan pengalaman latihan sudah sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan, dan pada setiap jabatan ada kemampuan minimum seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatannya. Selain itu pendidikan vokasi sudah memperhatikan peminatan pasar. Disarankan agar penyelenggara pendidikan vokasi lain yang berada dibawah kementerian selain Kemenristekdikti agar menerapkan program pendidikan vokasi, guna menjawab tantangan era Masyarakat ASEAN ke depan.

Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, ASN, pendidikan vokasi

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 menyisakan berbagai persoalan bagi Indonesia, baik yang positif maupun yang negatif. Menurut peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (LP3E Kadin), Suharyadi, dalam website job-like magazine (diunduh pada 25 januari 2017), salahsatu masalah yang akan dihadapi pemerintah Indonesia ini berkaitan dengan masalah SDM (Sumber Daya Manusia). Dikatakan bahwa Indonesia harus mampu menghadapi masalah selama ajang MEA ini berlangsung.

Masalah pertama yang harus dihadapi adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Menurut Suharyadi, ada dan tidak adanya MEA menuntut pemerintah untuk mampu menekan angka pengangguran yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Masalah kedua adalah akan terdapat 8 profesi yang dibuka untuk orang asing ketika MEA mulai berjalan. Diantaranya adalah arsitek, insinyur, perawat, tenaga pariwisata, tenaga survei, dokter gigi, praktisi medis dan juga akuntan. Dengan dibukanya 8 profesi untuk orang asing tersebut berpotensi untuk mendorong peningkatan jumlah pengangguran dari kalangan masyarakat berpendidikan tinggi di Indonesia. Ini merupakan kesempatan orang asing untuk menjadi pekerja di Indonesia sehingga masyarakat yang terdidik di Indonesia bisa tersisihkan.

Masalah ketiga adalah permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja akibat dampak dari MEA. Jika daya saingnya rendah, mereka berpotensi menjadi pengangguran dan jumlah tersebut bisa meningkat secara signifikan, karena MEA merupakan kesempatan orang asing untuk menjadi pekerja di Indonesia sehingga masyarakat yang terdidik di Indonesia bisa tersisihkan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang tersebut, sangat penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk memiliki keterampilan yang tepat guna di lingkungan kerja, aplikatif serta berdaya saing. Di lain pihak, Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, pemerintah diharapkan memainkan peran untuk mampu menekan angka pengangguran yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, antara lain melalui pengembangan SDM bidang pendidikan tinggi vokasi, dimana diharapkan lulusan vokasi telah memiliki bekal keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Implementasi penyelenggaraan *Vocational and Technical Education* di era Masyarakat ASEAN.

KAJIAN LITERATUR

ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC)

Negara-negara ASEAN sepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Sebagai perwujudan dari kesepakatan ini maka negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN tersebut menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu Komunitas

Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya *ASEAN Socio-Cultural Community (ASSC)*, ASEAN telah menyusun suatu Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*) yang telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Februari 2009. Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman (*guidelines*) bagi negara-negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2025 melalui pilar sosial budaya. Rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat enam elemen utama (*Core Element*) & 348 Rencana Aksi (*Action-lines*).

Dalam hal pembangunan manusia, sebagaimana yang tercantum didalam bagian A poin 10 ASSC Blueprint (2016), disebutkan bahwa :

“ASEAN will enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to human development opportunities by promoting and investing in education and lifelong learning, human resource training and capacity building, encourage innovation and entrepreneurship, promote the use of English language, ICT and applied science and technology in socio-economic development activities”.

Poin diatas merupakan rujukan bahwa salahsatu unsur penting dalam rangka mewujudkan cita cita untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dengan dukungan SDM yang berkualitas: baik, cerdas dan terampil adalah dengan mengembangkan bidang Pendidikan, khususnya *applied science*. Untuk itu, negara negara ASEAN berkomitmen untuk mendukung *Vocational and Technical education* serta penggunaan ICT di bidang pendidikan. Komitmen tersebut sebagaimana tercantum didalam ASSC Blueprint point A.5. hal mana bentuk komitmennya berupa memfasilitasi akses ilmu terapan dan teknologi terapan, dengan tujuan strategis sebagai berikut:

“Develop policies and mechanisms to support active cooperation in research, science and technology development, technology transfers and commercialisation and establishment of strong networks of scientific and technological institutions with the active participation of private sector and other relevant organisations”.

Aparatur Sipil Negara

Didalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, peran ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan public dan perekat serta pemersatu bangsa. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi, yang mana profesi ASN sebagaimana tercantum didalam Pasal 13, Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi dikenal sebagai pendidikan untuk bekerja. Lebih lanjut menurut Alim (2015) Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keahlian, kemampuan, pemahaman, tingkah laku, kebiasaan kerja dan penghargaan yang diperlukan dalam dunia kerja dan membuat kemajuan dalam pekerjaan yang menjadi dasar produksi dan pemanfaatannya. Sedangkan Pendidikan vokasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 16 ayat 1, Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi

program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Perbedaan utama antara pendidikan akademik dan vokasional terletak dalam keahlian yang dicapai lulusannya. Lulusan pendidikan akademik lebih berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan secara teori, sedangkan lulusan pendidikan vokasional lebih pada penguasaan praktek dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Menurut Alim (2015) untuk menghasilkan kualitas lulusan pendidikan vokasional yang menguasai praktek dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan tersebut, seyogyanya tujuan pendidikan tidak hanya sebatas mengejar hasil. Tapi harus dititikberatkan menjadi target yang berguna dari hasil pendidikan itu sendiri. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan vokasional. Dengan begitu, bukan hanya berbekal pengetahuan teori untuk bersaing dalam pasar kerja, namun lulusannya akan memiliki kompetensi vokasi yang berguna untuk menopang kecakapan hidup (spesialisasi keahlian).

Penelitian ini difokuskan pada pendidikan vokasi yang menjadi bekal bagi ASN, yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Dimana pembinaan bagi para ASN atas pendidikan terapan telah dilakukan oleh beberapa Kementrian/Lembaga, dalam bentuk Perguruan Tinggi Kementrian Lembaga (PTKL). Aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Capaian pembelajaran: melatih kebiasaan berpikir dan bekerja, memampukan setiap peserta didik memodali pengetahuan dan ketrampilan, kemampuan minimum yang harus dipunyai, memperhatikan peminatan pasar, ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain
- b. Tenaga pengajar: gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan
- c. Metode pembelajaran: tugas-tugas latihan, pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar
- d. Suasana dan lingkungan pembelajaran: replika
- e. Dukungan administrasi dan keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu:

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” (Moleong, 2007 : 6).

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi fokus perhatian adalah ingin mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah berkaitan dengan *Vocational and Technical Education* bagi Aparatur Negara di Indonesia serta mengidentifikasi standar kompetensi yang berkaitan dengan *Vocational and Technical Education* bagi Aparatur Negara di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan key informan, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, arsip nasional, dokumen resmi kementerian, kebijakan pemerintah, laporan

instansi, dsb. Key informan yang menjadi sumber informasi dalam wawancara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 Key Informan

No	Informant dalam kota	Instansi
1	Pakar kurikulum	UNJ
2	Pakar pendidikan vokasi	UNJ
3	Praktisi	
Informant luar kota		
1	Pejabat diklat	Prov Jabar
2	Pakar kurikulum	Univ Tirtayasa
3	Pakar pendidikan	Prov Lampung
4	Penyelenggara pendidikan	PKN STAN, STIP

Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. *Display Data*
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini ditekankan pada jabatan fungsional ASN dan keterkaitannya dengan pendidikan vokasi. Pada tahap awal akan dilakukan pembahasan tentang keterkaitan antara persyaratan yang diperlukan guna mengisi jabatan fungsional dengan kerangka kualifikasi nasional (KKNI).

Keterkaitan Jabatan Fungsional dengan KKNI

Jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara jumlah seluruh jabatan fungsional sebanyak 142 jabatan. Untuk memwadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan yang diperlukan, Pemerintah mengelompokkan seluruh jabatan fungsional yang ada kedalam 25 rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Seluruh jabatan fungsional tersebut dibina oleh 46 kementerian dan lembaga non kementerian.

Dalam kaitannya dengan KKNI, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Penjenjangan kualifikasi kompetensi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
- jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Adapun deskripsi jenjang kualifikasi sebagaimana yang tertuang didalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2 Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membimbing orang lain.
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan dapat dikategorikan dalam jenjang kualifikasi kompetensi serendah-rendahnya pada jenjang 5 dan 6, dengan deskripsi kualifikasi:

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural
- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pembahasan Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga non kementerian yang tidak berada dibawah Kemendikti dan Kemenag, yang biasa disebut sebagai perguruan tinggi kedinasan (PTK). Penyelenggaraan pendidikan vokasi tersebut sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Berdasarkan data dari Kemenristekdikti sebagaimana digambarkan pada tabel 6 diperoleh informasi bahwa sampai awal tahun 2017 terdapat 4.492 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, dimana diantaranya terdapat 181 perguruan tinggi kedinasan (PTK) yang berada dibawah kementerian dan non kementerian selain Kemendikti dan Kemenag.

**Tabel 3 Rekap Nasional Perguruan Tinggi
Semester Genap 2016/2017**

	Perguruan Tinggi			Dosen		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
PT	122	3,131	3,253	71,420	163,118	234,538
PTA	77	981	1,058	12,023	10,294	22,317

	Perguruan Tinggi			Dosen		
PTK	181	0	181	9,600	0	9,600
Total	380	4,112	4,492	93,043	173,412	266,455

Sumber : Kemenristekdikti, 2017 . Data terakhir per 19 Feb 2017 19:32

Berdasarkan data tabel tersebut mengindikasikan bahwa PTK mempunyai peran sebesar 4 persen dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012, bentuk tertinggi untuk pendidikan vokasi adalah Politeknik, yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi mulai dari jenjang Diploma I hingga Doktor (S3) Terapan. PKN STAN merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang cukup dikenal yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

a. Capaian pembelajaran

Capaian pembelajaran pada Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah:

1. menyelenggarakan program pembelajaran berkualitas tinggi dalam rangka penguasaan pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara;
2. menyelenggarakan penelitian berkualitas tinggi dalam rangka pengembangan dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara; dan
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara.

Politeknik Keuangan Negara memiliki 4 jurusan yaitu Jurusan Akuntansi, Jurusan Pajak, Jurusan Kepabeanan dan Cukai, serta Jurusan Manajemen Keuangan.

b. Tenaga Pengajar

Pada tahun 2016 PKN STAN telah memiliki 21 orang dosen tetap. Selain itu masih terdapat 56 calon dosen tetap lagi yang belum dapat dikukuhkan karena masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk diangkat sebagai dosen tetap. Seluruh dosen tetap dan calon dosen tetap di PKN STAN merupakan rekrutmen khusus pegawai struktural dan fungsional di lingkungan BPPK dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PKN STAN berupa perkuliahan, praktikum, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi dan teknik yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada

mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

d. Suasana dan Lingkungan Pembelajaran: Replika

Penyelenggaraan pendidikan untuk Program Studi Diploma IV Akuntansi diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jl. Purnawarman No.99 Jakarta Selatan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan untuk Program Studi Diploma III Akuntansi diselenggarakan di Kampus PKN STAN.

Penyelenggaraan pendidikan untuk Program Studi Diploma III Pajak dan Program Diploma III Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai diselenggarakan di Kampus PKN STAN. Sedangkan untuk Program Studi Diploma I Pajak, selain diselenggarakan di Kampus PKN STAN, juga mengambil tempat di 11 Balai Diklat Keuangan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan untuk Program Studi Diploma III Kepabeanaan dan Cukai diselenggarakan di Kampus PKN STAN. Sedangkan untuk Program Studi Diploma I Kepabeanaan dan Cukai, selain diselenggarakan di Kampus PKN STAN, juga mengambil tempat di Balai Diklat Keuangan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh Program Studi Diploma di bawah Jurusan Manajemen Keuangan diselenggarakan di Kampus PKN STAN.

e. Dukungan administrasi dan keuangan

Dukungan administrasi berupa sarana pendidikan antara lain peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor dan lingkungan akademik lainnya. Sedangkan prasarana pendidikan antara lain berupa bangunan, lahan percobaan dan fasilitas lainnya.

Dalam hal dukungan keuangan pada PKN STAN sebagai perguruan tinggi nirlaba, telah melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun begitu masih tetap memerlukan pendanaan yang bersumber dari APBN. Hal ini disebabkan karena PKN STAN tidak mengenakan pungutan apapun kepada mahasiswa yang berstatus ikatan dinas.

Pendidikan Vokasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta

STIP Jakarta merupakan Sekolah Kedinasan dibawah Kementerian Perhubungan. Sebagai sekolah vokasi, STIP Jakarta berperan menjadi lembaga yang mendidik sumber daya manusia menjadi perwira-perwira pelayaran niaga serta Ahli Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang handal dan berkualitas internasional.

a. Capaian pembelajaran

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta memiliki 3 Program Studi yakni Nautika, Teknik dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Ketiga Program Studi tersebut semuanya mendapat Akreditasi dengan Peringkat "A".

b. Tenaga Pengajar

Berdasarkan telaah dokumen diperoleh informasi jumlah dosen STIP Jakarta sebanyak 163 orang, dengan rincian: dosen tetap sebanyak 96 orang, dosen tidak tetap sebanyak 67 orang. Tingkat keahlian masing-masing dosen berbeda-beda mulai dari ahli nautika, ahli nautika dan ahli ketatalaksanaan.

c. Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran yang digunakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta adalah kombinasi antara Perkuliahan (teori), Praktikum pada Laboratorium, bengkel dan simulator serta praktek kerja lapangan di kapal / berlayar atau magang di kantor perusahaan pelayaran/pelabuhan.

d. Suasana dan lingkungan pembelajaran: replika

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang proses belajar-mengajar terlaksana dengan baik, salah satu fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta adalah Simulator. Sampai dengan saat ini STIP memiliki 13 Simulator. Selain itu terdapat 21 laboratorium, diantaranya: lab. Fisika, lab. Kimia, lab. Kecakapan bahari, lab. Bahasa, dll.

e. Dukungan administrasi dan keuangan

Semua peserta didik diasramakan dan disebut Taruna/Taruni STIP Jakarta. Dukungan administrasi di STIP berupa sarana dan prasarana pendidikan antara lain: peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, simulator, kantor dan lingkungan akademik lainnya. Sedangkan prasarana pendidikan antara lain berupa: bangunan, kolam latihan dan fasilitas lainnya.

Dalam hal keuangan, STIP Jakarta merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai status Badan Layanan Umum (BLU).

PENUTUP

Penyelenggaraan Vocational and Technical Education oleh PKN STAN dan STIP Jakarta, menerapkan prinsip-prinsip pendidikan vokasi, diantaranya: tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Metode pembelajaran diberikan agar dapat memampukan setiap individu memodali pengetahuan dan ketrampilannya sesuai kebutuhan profesi. Lebih lanjut peserta didik diberikan pengalaman latihan sudah sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan, dan pada setiap jabatan ada kemampuan minimum seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatannya. Selain itu pendidikan vokasi sudah memperhatikan peminatan pasar.

Disarankan agar penyelenggara pendidikan vokasi lain yang berada dibawah kementerian selain Kemenristekdikti agar menerapkan program pendidikan vokasi, guna menjawab tantangan era Masyarakat ASEAN ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku:

Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta

- Bungin, Burhan (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana
- Button, Kenneth Et Al. (2001). *The Long Term Educational Needs Of A High-Technology Society*. Washington, Dc: 21st Century Workforce Commission
- Moleong, Lexy J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sudira, Putu (2014). *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*. Yogyakarta : UNY Press
- The ASEAN Secretariat (2016). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*. Jakarta : The ASEAN Secretariat

Pustaka yang berupa Undang-undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor [5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999
- Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

Pustaka lain:

- Profil Jabatan Pegawai Negeri Sipil 2016 terbitan Direktorat Jabatan ASN, BKN (data update hingga 31 Des 2015)
- Alim, Syahirul (2015). Pendidikan Vokasional : Solusi Alternatif Pendidikan di Indonesia. <http://pendidikanteknikmesinundana.blogspot.co.id/2015>
- www.oxfordbibliographies.com
- <http://education.stateuniversity.com/pages/2533/Vocational-Technical-Education>
- www.pknstan.ac.id
- www.stipjakarta.ac.id